



Mendefinisikan Kembali Perdebatan Globalisasi

Farooq Khan

2006

Abstrak

Esai ini berusaha membahas berbagai tantangan dan masalah yang disebabkan oleh globalisasi. Permasalahan dan tantangan tersebut adalah terkait dengan identitas – dalam hubungannya dengan negara bangsa, dan ketimpangan struktur sosio-politik-ekonomi –sistem kehidupan. Esai ini juga menunjukkan bahwa keduanya hal tersebut berusaha dijawab oleh paradigma kapitalisme sekuler dan sosialisme melalui penciptaan filsafat politik global versi mereka sebagai bentuk definisi ulang globalisasi. Sayangnya filsafat politik global dari kedua paradigma tersebut dinilai penulis telah gagal secara intelektual, karena inkonsistensi logika pemecahan masalahnya, dan sistem kehidupan keduanya yang malah menimbulkan berbagai disparitas dan kontradiksi. Sementara itu Islam sebagai pendekatan baru dinilai penulis berhasil memecahkan masalah inkonsistensi intelektual dari sistem filsafat politik global, dan mampu menyediakan sistem kehidupan global yang manifestatif serta tidak menciptakan disparitas dan kontradiksi.

Diterjemahkan Oleh
Rizki S. Saputro
Diunduh dari

<http://rizkisaputro.wordpress.com>

Daftar Isi

Abstrak	1
Daftar Isi	2
Pengantar	3
Perkembangan Globalisasi	4
Konteks Globalisasi	8
Pergerakan anti-Globalisasi	12
Islam dan Perdebatan Mengenai Globalisasi	16
Referensi	20

Redefining Globalisation Debate

Oleh: **Farooq Khan**¹

Pengantar

Hingga kini, perdebatan mengenai globalisasi sebagian besarnya dibentuk oleh para pendukung kapitalisme, dan pergerakan anti-globalisasi, yang mendasarkan inspirasi ideologis mereka kepada pemikiran-pemikiran politik dari filsafat sosialis. Meski demikian, semua ini akan berubah sebagaimana badai ideologis baru mulai muncul di cakrawala untuk mendefinisikan ulang batasan-batasan intelektual dari perdebatan mengenai globalisasi.

Kita telah memasuki sebuah era baru perubahan yang sangat penting, yang ditentukan oleh globalisasi dan transisi menuju era pascaindustri. Para politisi, pemikir, dan bangsa-bangsa tidak dapat lagi egois dalam konteks nasionalisme sempit, [konteks] yang sebelumnya telah mempopulerkan negara bangsa modern di era industri. Kita harus berpikir dalam sebuah konteks internasional baru, karena globalisasi memiliki makna bahwa bangsa-bangsa tidak dapat lagi berpikir memikirkan dirinya sendiri dan terisolasi dari negara lain. Semakin tumbuhnya saling ketergantungan di antara bangsa-bangsa yang didorong oleh perubahan-perubahan di dalam struktur ekonomi global, hubungan internasional, dan kemajuan teknologi, memaksa rakyat untuk mempertanyakan sifat dasar negara bangsa dan organisasi sosial, yang belum sepenuhnya kita pahami. Pemikiran radikal baru dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan baru, yang tidak sama dengan periode lain dalam sejarah manusia. Hal ini disebabkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita, tantangan-tantangan tersebut harus diselesaikan dalam kapasitas komunitas global. Hal tersebut benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan perdebatan internasional ini membutuhkan sebuah filsafat politik global, yang menjadi subyek bahasan dalam esai ini.

¹ Diadaptasi oleh Rizki S. Saputro dari Jurnal New Civilisation

Perkembangan Globalisasi

Secara historis, globalisasi dapat dikatakan telah dimulai dengan pertumbuhan perdagangan internasional yang semakin cepat seiring dengan kemajuan teknologi transportasi selama abad ke-15. Kemajuan yang terjadi di dalam pembuatan kapal dan navigasi, dikombinasikan dengan revolusi ideologi di Eropa sebagai konsekuensi dari reformasi dan *renaissance*, semakin mempercepat laju kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Selama transformasi politik dan intelektual di Eropa, kapitalisme telah muncul sebagai fitur dominan dari filsafat sekuler yang menciptakan paradigma yang benar-benar baru di dalam pemikiran ekonomi dan kreativitas intelektual. Hal ini memiliki pengaruh yang amat dalam, bukan hanya dalam hal mengintegrasikan dunia, tetapi juga dalam hal bentuk dunia selama beberapa abad kemudian.

Kemunculan bursa saham pada abad ke-16 membuat kekuatan-kekuatan baru di Eropa dapat mendanai peperangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Eropa berdagang dengan Afrika, Amerika, Timur Dekat [Timur Tengah], dan Timur Jauh [Asia], dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang kemudian berkulminasi pada kolonisasi tanah-tanah tersebut. Sebagai konsekuensinya, kolonialisme Barat telah dan terus memiliki dampak yang mendalam terhadap integrasi global. Industrialisasi telah mempercepat kekuatan-kekuatan globalisasi, yang ditunjukkan oleh Inggris dengan luasnya jaringan rel kereta api yang ia ciptakan di sepanjang kerajaannya. Profesor Niall Ferguson menulis dalam bukunya, 'Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power,' bahwa Inggris telah membangun dunia modern dan menegakkan infrastruktur bagi globalisasi pada abad ke-19 dan ke-20. Akan tetapi, Amerika dengan cepat menggantikan Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, dalam hal politik, ekonomi, dan teknologi, pasca Perang Dunia II. Sementara Inggris, Perancis, dan Jerman memimpin dunia selama revolusi industri, Amerika kini memimpin dunia ke dalam revolusi pascaindustri dengan memanfaatkan kekuatan pengetahuan dan informasi.

Alvin Toffler menjabarkan periode ini sebagai 'gelombang ketiga' (third wave) dan lahirnya sebuah 'peradaban baru' (new civilisation), sementara Francis Fukuyama menjabarkannya sebagai 'kekacauan besar' (great disruption). Transformasi historis ini bukan hanya mengubah asas penciptaan kesejahteraan tetapi juga mempercepat sebuah evolusi di dalam pemikiran politik Barat. Philip Bobbit menjabarkan siklus pembukaan zaman baru (epoch-making cycle) sebagai sesuatu yang telah merubah secara fundamental sifat dasar dari negara bangsa. Ia mengatakan, "Tiga inovasi strategis telah memenangkan Perang Panjang: senjata nuklir, komunikasi internasional, dan teknologi komputasi cepat matematika. Setiap darinya telah menempa sebuah perubahan dramatis dalam tantangan-tantangan militer, budaya, dan ekonomi yang dihadapi negara bangsa. Di dalam setiap bidang tersebut, negara bangsa menghadapi kesulitan yang semakin besar dalam hal mempertahankan kredibilitas klaimnya terkait kemampuan penyediaan *public goods* untuk bangsanya."

Oleh karenanya Globalisasi sebenarnya menyajikan pada dunia tantangan-tantangan, dinamika-dinamika, dan peluang-peluang baru yang sangat penting di zamannya. Anthony Giddens berkata, "globalisasi adalah pembentukan ulang struktur terkait cara-cara kita hidup" dan "era negara bangsa telah berakhir." Isu yang dipertikaikan yang sejauh ini telah memisahkan para pemikir Barat adalah apakah globalisasi merupakan sesuatu, yang merusak kemajuan manusia, atau apakah ia adalah sesuatu yang dapat memajukan kemanusiaan di level global. Joseph Stiglitz yakin bahwa kapitalisme dapat mengangkat dunia selama globalisasi dapat dikelola dengan tepat. Penerima penghargaan Nobel itu mengatakan, "saya yakin bahwa globalisasi –penghapusan batas-batas untuk perdagangan bebas dan semakin terintegrasinya perekonomian nasional– dapat menjadi kekuatan kebaikan dan ia memiliki potensi untuk memperkaya semua orang di dunia, terutama mereka yang miskin," oleh karenanya, "masalahnya bukan pada globalisasi, tetapi pada bagaimana ia dikelola. Sebagian dari masalah

juga ada pada lembaga-lembaga ekonomi internasional, yakni IMF, Bank Dunia, dan WTO, yang telah menuntun penyetulan aturan-aturan permainan.”

Meski demikian pergerakan anti-globalisasi berpendapat bahwa globalisasi telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang tidak pernah ada sebelumnya, yang telah menjadi sinonim dengan kapitalisme dan imperialisme Barat. Tidak ada keraguan bahwa globalisasi yang kita alami hari ini memiliki makna eksploitasi politik dan ekonomi, tetapi ada mereka-mereka yang ada di Kiri politik yang juga menyadari peluang-peluang yang disajikan globalisasi pada dunia, yang berarti bahwa diperlukan adanya pembedaan antara globalisasi dan sistem ideologi kapitalisme yang saat ini membentuk integrasi global. Visi ini diartikulasikan oleh George Monbiot di dalam manifesto tatanan dunia baru-nya. Ia berkata, “Tugas kita bukanlah untuk menjatuhkan globalisasi, tetapi untuk menangkapnya, dan menggunakannya sebagai sebuah mesin bagi revolusi demokrasi global untuk kemanusiaan, yang pertama kalinya.”

Oleh karena itu, perdebatan mengenai globalisasi sebenarnya melampaui batas-batas nasional –ia adalah perdebatan revolusioner tentang bagaimana dunia dijalankan dan bagaimana kehendak politis rakyat dapat disuarakan dan diwakilkan di dalam dunia yang terglobalkan. Isu ini mungkin, menyajikan satu dari tantangan-tantangan terbesar bagi filsafat politik Barat semenjak zaman reformasi dan *renaissance*, sebab saat ini dunia membutuhkan sebuah filsafat politik yang dapat melingkupi dinamika-dinamika baru kemanusiaan yang sedang dan akan kita hadapi pada abad ke-21. Tentu saja, para pemikir Barat tidak hanya dikonfrontasikan dengan isu-isu filosofis tetapi juga kepraktisan-kepraktisan untuk memastikan bahwa sistem yang demokratis dapat bekerja di dalam konteks global. Matthew Horsman dan Andrew Marshall menulis tentang “kebutuhan mendesak untuk mencari cara-cara baru perwakilan kolektif,” dan Will Hutton berkata, “Di dalam era globalisasi, semua negara bangsa perlu untuk bekerja sama dan berkolaborasi jika mereka ingin mewakili kepentingan-kepentingan warga negaranya.”

Oleh karenanya, salah satu dari pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh para pemikir di seluruh dunia adalah apakah kapitalisme ataupun sosialisme dapat melampaui paradigma-paradigma modern mereka yang sebelumnya telah membentuk periode industrialisasi, sehingga dapat menghadapi tantangan-tantangan posmodern di era informasi dan dunia yang terglobalkan. Sebab, perubahan dari masalah-masalah spesifik nasional dan regional menuju masalah-masalah global inilah yang membedakan periode saat ini dari periode yang lain. *Renaissance* dilahirkan dari masalah-masalah spesifik di dalam pengalaman Eropa, yakni manakala para pemikir Barat menantang otoritas kekuasaan monarki dan validitas intelektual Kristen. Adapun sosialisme-Marxisme dimunculkan dari masalah-masalah sosial yang dimunculkan kapitalisme, yang spesifik bagi kekuatan-kekuatan industri baru. Mereka adalah periode-periode pembukaan zaman baru di dalam sejarah, dan penemuan globalisasi bermakna perubahan sosial penting lain yang berada di dalam kancah awal evolusi politik, yakni perubahan dan perdebatan politis tidak lagi spesifik terhadap negara (bangsa) atau wilayah (regional) tertentu.

Di era globalisasi, masalah-masalah yang dihadapi satu negara seringkali juga dihadapi oleh negara lain, karena kapitalisme merupakan kekuatan penentu dari organisasi politik-sosio-ekonomi di dunia saat ini, dan sebagai hasilnya, masalah-masalah di dunia saling berhubungan. Hal ini dapat dibuktikan bukan hanya dengan adanya fakta bahwa terdapat masalah-masalah yang unik pada masyarakat kapitalis dan yang oleh karena itu juga dialami oleh setiap bangsa di muka bumi, tetapi juga dapat dibuktikan oleh organisasi-organisasi internasional yang menentukan kebijakan ekonomi di tingkat nasional, regional, dan global. IMF, Bank Dunia, dan PBB adalah lembaga-lembaga agen utama bagi integrasi global, adapun masalah-masalah sosial seperti kemiskinan adalah sesuatu yang universal bagi semua bangsa, sebab perekonomian dunia diperintah oleh doktrin pasar bebas.

Hal ini berarti bahwa pengalaman manusia atas kapitalisme adalah sama secara global dan oleh karena itu perdebatan yang dihadapi satu bangsa juga akan dihadapi oleh setiap bangsa karena kita semua hidup di bawah sistem kehidupan ini. Karakteristik perdebatan mungkin berbeda dari satu bangsa dengan bangsa yang lain, tetapi secara asali mereka semua muncul dari akar ideologis yang sama. Dan aspek inilah yang dapat secara potensial membawa kita pada sebuah perdebatan dan revolusi global, yang tidak pernah terjadi pada periode sejarah manusia manapun.

Konteks Globalisasi

Saat ini dan sejauh ini, parameter-parameter perdebatan global didiskusikan di dalam konteks sekuler. Kelas-kelas politik dan intelektual dari semua spektrum filsafat politik Barat telah mencapai beberapa kesimpulan mengenai bagaimana mengelola perubahan revolusioner ini. Meski demikian masih terdapat lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ketimbang jawaban-jawaban yang sudah ada. Hal ini telah menciptakan cukup banyak pergolakan di antara para pemikir di Dunia Barat. Tentu saja perdebatan-perdebatan tersebut amat penting sebagaimana perdebatan-perdebatan yang telah mengangkat negara bangsa modern, karena globalisasi sedang memaksa kita untuk mengevaluasi kembali konsepsi kita mengenai identitas, politik, dan negara. Orang lain boleh juga berpendapat bahwa perdebatan-perdebatan tersebut juga sepenting perdebatan-perdebatan *renaissance*, karena globalisasi diimbangi oleh kemajuan saintifik revolusioner yang memberikan kita wawasan baru terhadap sifat dasar manusia dan bagaimana kita sebagai sebuah spesies dapat maju. Terlebih lagi, konsepsi kita tentang sifat dasar manusia-lah yang membentuk filsafat politik. Steven Pinker menyoroti realitas ini dalam bukunya, 'The Blank State' yang di dalamnya ia menjabarkan bagaimana pandangan-pandangan kita mengenai sifat dasar manusia menentukan sifat dasar politik dari negara. Teori John Locke tentang empirisisme menunjukkan eksisnya konsep ini, karena teori

empirisisme dari Locke inilah yang menjadi salah satu pondasi konseptual dari demokrasi liberal. Maka, perdebatan di abad ini merupakan perdebatan yang revolusioner, dan terdapat perjuangan di antara para pemikir Barat untuk menghasilkan beberapa konsensus ideologis tentang bagaimana menghadapi tantangan-tantangan penting tersebut.

Hal ini jelas terlihat di seluruh Dunia Barat, seiring garis pertempuran sedang digambar di antara Kanan dan Kiri. Di Amerika, isu-isu filosofis ini semakin diperparah oleh realitas politik dari statusnya sebagai negara superpower dan bagaimana ia harus memproyeksikan kekuatan tersebut. Sementara di Inggris dan negara-negara Eropa, tradisi-tradisi dan konsepsi-konsepsi politik negara bangsa abad ke-20 yang saat ini masih menjadi pemikiran penentu dari perpolitikan konservatif, semakin ditantang. Hal ini telah membawa kaum tradisional konservatif ke dalam konflik dengan kaum konservatif progresif baru yang telah mencengkeram peluang-peluang dan tantangan-tantangan pendefinisian ulang konservatisme dalam dunia yang terglobalkan. Philip Bobbit mungkin adalah yang terbaik dalam mewujudkan filsafat kaum kapitalis progresif, yang dapat melihat melebihi konsep-konsep usang dari paradigma-paradigma politik abad ke-20. Mereka dapat mengindera bagaimana konstitusi negara harus berkembang agar dapat menghadapi realita-realita baru globalisasi dan dunia pascaindustri. Hal ini ditonjolkan lebih lanjut dengan adanya migrasi manusia besar-besaran dari benua ke benua, yang telah mengubah wajah dan struktur masyarakat Barat. Jadi, pemikiran khas dari nasionalisme yang telah membentuk negara bangsa modern abad ke-20 jelas sekali tidak dapat lagi terus berjalan. Dalam sebuah koleksi esai yang diterbitkan oleh lembaga pemikir Inggris, the Foreign Policy Centre, dengan judul 'Reclaiming Britishness,' para pemikir Inggris berupaya untuk menghadapi isu-isu kompleks tersebut. Mark Leonard, direktur the Foreign Policy Centre berkata, "Apakah nilai-nilai Inggris itu –dan akankah mereka membantu kita dalam membuat berbagai keputusan? Ketika muncul konflik, kelas-kelas politik mencari tali yang dapat mengikat. Baik David Blunkett dan Peter Hain, keduanya pernah

menyatakan bahwa kaum imigran perlu untuk menjadi ‘lebih ke-Inggris-Inggris-an’ –tetapi seruan mereka terkait ‘nilai-nilai Inggris’ hanya semakin menyoroti tingkat kebingungan mereka mengenai kandungan dari identitas Inggris.”

Perdebatan tersebut sebenarnya menunjukkan bagaimana nasionalisme tidak kompatibel dengan realitas kehidupan, karena globalisasi melebihi etnisitas. Apa maksudnya ini adalah bahwa nasionalisme [merupakan isme yang] selalu cacat secara filosofis, dan oleh karenanya selalu tidak cocok dijadikan sebuah asas untuk menentukan identitas seseorang. Mengapa saya berkata demikian? Subyek identitas adalah pertanyaan sentral bagi setiap umat manusia dan juga setiap bangsa, karena ia bukan hanya menentukan siapakah diri kita, tetapi juga bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan. Hal ini berarti bahwa bangsa-bangsa terutama di Dunia Barat belum memecahkan pertanyaan mendasar ini dengan tepat. Sebagai konsekuensinya, para pemikir seperti Philip Bobbit mengakui bahwa negara harus mendefinisikan kembali konstitusinya dan melingkupi dinamika-dinamika baru yang sedang membentuk realitas dunia hari ini. Bobbit menjabarkan negara ini sebagai sebuah ‘Negara Pasar’ (the Market State), sementara diplomat Inggris Robert Cooper menjabarkannya sebagai ‘Negara Posmodern’ (Post-Modern State).² Kedua istilah tersebut meringkas kebutuhan untuk mengadaptasikan filsafat politik Barat dan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali identitas politik satu bangsa. Akan tetapi, meski telah terjadi evolusi pemikiran ini, kita mendapati mereka masih belum dapat meninggalkan sepenuhnya nasionalisme sebagai asas identitas politik satu bangsa, yang dapat dibuktikan oleh fakta bahwa bangsa-bangsa masih eksis sebagai entitas yang independen. Tesis Bobbit atas Negara Pasar digunakan untuk menghadapi realitas multikultural dari masyarakat Barat dengan mendefinisikan identitas politik melalui seperangkat nilai yang dapat merangkul perbedaan budaya dan ras.

² Jabaran Cooper dapat dilihat di <http://rizkisaputro.wordpress.com/tag/wacana-dan-pemikiran-barat/index.html> di bawah judul “New Liberal Interventionism”; Sesungguhnya esai ini dapat dipandang pula sebagai tanggapan terhadap wacana pemikiran tersebut.

la berkata, “Kita akan tidak terelakkan lagi untuk mendapatkan sebuah negara multikultural ketika negara bangsa kehilangan legitimasinya sebagai penyedia dan penjamin persamaan [hak].” Lebih lanjut ia berkata, “Negara Pasar adalah negara tanpa kelas dan acuh tak acuh terhadap ras, etnisitas, dan gender ... Negara Pasar dapat diakses oleh semua masyarakat.”

Filsafat ini memberikan beberapa perspektif segar terkait subyek identitas politik. Jikapun ia tidak memuaskan, ia telah menetapkan kediaman-kediaman sentral bagi keyakinannya di mana setiap umat manusia berpartisipasi dalam setiap urusan negara melalui pasar. Dikatakan, “Di dalam Negara Pasar, negara bertanggung jawab untuk memaksimalkan pilihan-pilihan yang ada bagi tiap individu. Hal ini berarti merendahkan biaya-biaya transaksi yang dipilih oleh setiap individu dan seringkali hal itu berarti mengendalikan, ketimbang memberdayakan, pemerintah.” Hal itu adalah identitas politik yang khas dari konsep-konsep kapitalis ‘murni,’ sebuah keyakinan di dalam ideologi negara, ketimbang, sebuah negara yang ditentukan oleh etnisitasnya. Akan tetapi hal ini tidak dapat memecahkan permasalahan identitas dengan cukup memuaskan karena masih belum jelas apakah yang kemudian menentukan bahwa negara ini adalah negara Amerika, Inggris, Perancis, atau barangkali malah Eropa? Jika nilai-nilai sekuler dan kapitalis adalah asas satu-satunya dari identitas sebuah bangsa, mengapa kemudian ada lebih dari satu pemerintahan? Terlebih lagi, bangsa-bangsa Barat semuanya yakin terhadap sekulerisme. Poin ini menjadi semakin jelas ketika kita memeriksa transisi negara-negara ke dalam konstitusi Eropa. Negara-negara Eropa bertujuan untuk mengintegrasikan perekonomian mereka dan menempa sebuah konstitusi yang akan menentukan pemerintahan Uni Eropa. Meski demikian, bangsa-bangsa tersebut masih resisten untuk benar-benar menyerahkan kedaulatan politik mereka pada Uni Eropa dikarenakan alasan mempertahankan kepentingan nasional. Perbedaan ini mengungkap permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa-bangsa Barat dan Dunia. Artinya, filsafat politik Barat tidak dapat membuat sebuah konstruksi solusi rasional yang menyeluruh untuk menjawab pertanyaan

kehidupan yang paling mendasar. Sebagai konsekuensinya, filsafat politik bukanlah pendorong di balik integrasi Eropa yang semakin dekat, tetapi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi-lah yang memaksa filsafat Barat untuk mengadaptasikan diri mereka pada realitas. Berabad-abad pertempuran internal di benua Eropa di antara kekuatan-kekuatan besar Eropa, serta kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi dari globalisasi, memaksa bangsa-bangsa untuk mengambil langkah bersejarah, dan bukannya mengambil pandangan falsafah mengenai eksistensi diri kita. Hal ini adalah poin yang sangat penting untuk disoroti karena ia menunjukkan permasalahan intelektual dari filsafat Barat. Bukan hanya filsafat Barat-nya yang menjadi alasan masalah-masalah tersebut, tetapi juga nilai-nilai dan konsep-konsepnya terbukti tidak kompatibel dengan kemajuan manusia. Hal ini bukan hanya dapat dibuktikan oleh erosi nasionalisme sebagai filsafat politik, tetapi dibuktikan oleh setiap segi dari keyakinan sekuler dan sistem ekonomi kapitalis yang saat ini mendominasi dunia.

Pergerakan anti-Globalisasi

Pergerakan anti-Globalisasi di sisi lain menyediakan sebuah alternatif yang berbeda, dan lagi, di dalam filsafat politik alam sosialis kita menemukan perbedaan di antara para pemikir terkemuka mereka. Terdapatlah mereka yang berpendapat keras melawan globalisasi dan terdapat pula mereka yang mengakui bahwa globalisasi dapat menjadi kekuatan kebaikan jika asas globalisasi dijalankan atas jalur intelektual yang berbeda. George Monbiot mengartikulasikan hal ini untuk merestrukturisasi total tatanan dunia. Salah satu pandangannya yang didasarkan atas pandangan filosofis mengenai dunia, adalah "Tentu saja, semua kebangsaan pada suatu tingkat tertentu adalah artifisial, produk dari kecelakaan sejarah, kenyamanan kaum tiran, dan pelepasan kaum yang tinggal di koloni-koloni." Lebih lanjut ia menjabarkan pandangan Darwinian atas identitas yang menurutnya harus menjadi landasan filosofis dari semua masyarakat di dunia, "Mutasi baru akan memaksa kita untuk meninggalkan kebangsaan sebagaimana, di dalam zaman-

zaman awal, kita meninggalkan para Baron [tuan tanah] dan Klan-klan ... untuk pertama kalinya di dalam sejarah kita akan melihat diri kita sendiri sebagai satu spesies.”

Sementara visi kapitalis berusaha untuk mempertahankan negara bangsa sekalipun dalam sebuah bentuk baru, visi anti-Kapitalis berusaha untuk mengeliminasi eksistensi negara-negara bangsa secara keseluruhan melalui penciptaan struktur internasional yang akan benar-benar mewakili kehendak rakyat. Pergerakan anti-Kapitalis atau apa yang juga dikenal sebagai pergerakan keadilan global (global justice movements), berusaha untuk merealisasikan pandangan kehidupan ini melalui penciptaan sebuah parlemen dunia. Oleh karena itu, pergerakan keadilan global menyadari bahwa struktur-struktur internasional baru sangat dibutuhkan jika kehendak politik kemanusiaan mau diekspresikan secara benar-benar demokratis. Adapun struktur internasional saat ini menurut mereka tidak menyerupai realitas sesungguhnya dari globalisasi dengan berbagai kemungkinannya untuk menghadirkan berakhirnya konflik dan semua ragam permasalahan yang mewabah di dunia. Bank Dunia, IMF, dan PBB, hanyalah lembaga-lembaga yang diciptakan untuk menciptakan dunia yang lain, yakni sebuah dunia terindustrialisasi dan dunia bipolar. Untuk alasan itulah, menurut mereka, saat ini dunia bergerak semakin dekat pada integrasi global dan pada pascaindustrialisasi yang berarti bahwa struktur-struktur yang ada perlu untuk diruntuhkan demi memfasilitasi transisi bersejarah ini. Menurut mereka, tentu saja struktur-struktur tersebut diciptakan oleh superpower-superpower abad 20 untuk melanjutkan kepentingan imperialis mereka di seluruh dunia, dan di alam hubungan internasional dan ekonomi internasional inilah kita akan menemukan perdebatan besar di antara Kiri dan Kanan mencapai titik didihnya.

Satu permasalahan mendasar adalah bahwa kaum kapitalis berusaha untuk mempertahankan kekuatan mereka baik itu di dalam negeri mereka sendiri ataupun secara global. Kaum kapitalis di benua Eropa, seiring dengan berpindah menuju integrasi ekonomi dan kerja sama politik, masih mempertahankan

kemandirian bangsa masing-masing, demi mempertahankan kekuatan mereka di tiap bangsa, sehingga mereka dapat menantang kekuatan Amerika. Kaum kapitalis Amerika di sisi lain berusaha untuk mempertahankan imperium global mereka dan memonopoli kekayaan material di dunia. Hal ini dapat dibuktikan dalam hal perbedaan antara Eropa dan Amerika terkait berbagai isu mulai dari bagaimana memperjuangkan perang melawan teror hingga perubahan iklim global. Pembicaraan di Kyoto menunjukkan inkonsistensi intelektual bangsa-bangsa tersebut yang memenangi globalisasi. Amerika menolak protokol Kyoto meski telah muncul konsensus yang meluas di dalam komunitas dunia. Dan perang kata atas bea cukai besi, lebih lanjut menunjukkan inkonsistensi dari perdagangan bebas dan ekonomi global di antara Eropa dan Amerika.

Oleh sebab itu, globalisasi sesungguhnya digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapitalis besar untuk memperluas kepentingan nasional mereka sendiri. Bangsa Eropa berusaha untuk menjadi mitra sebanding Amerika dengan menciptakan sebuah tatanan internasional baru yang didasarkan pada kepentingan dan tanggung jawab bersama. Dominique de Villepin berkata, "Jalan menuju dunia baru adalah salah satu hal yang dapat benar-benar kita petakan bersama ... Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dan beradaptasi dengan situasi dunia yang baru, kita memiliki kewajiban untuk dibagi bersama. Tanpa rintangan-rintangan dan batas-batas, dunia kita akan kaya dan menjanjikan di masa depan ... Tidak ada tatanan internasional yang dapat dibangun atas kekuatan satu negara saja. Maka jalan apakah yang harus kita ambil? Mengambil rute unilateral adalah utopia. Jika kita ingin menjadi efektif, kita harus memiliki legitimasi. Maka rute multilateral adalah satu-satunya yang realistis. Eropa harus menjadi salah satu pilar dari dunia baru ini!" Tony Blair lebih lanjut menyoroti pemikiran ini ketika ia mengatakan, "Hal tersebut berarti mereformasi PBB dan juga Dewan Keamanan yang mewakili realitas abad ke-21; dan memberikan PBB kapasitas untuk bertindak secara efektif sebagaimana perdebatan [yang terjadi secara efektif di PBB]." Oleh karena itu, kita menemukan bahwa kaum kapitalis

tidak membuat penilaian-penilaian hanya berdasarkan pemikiran filsafati mengenai identitas, tetapi penilaian-penilaian mereka buat berdasarkan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Tentu saja, semenjak berakhirnya Perang Dingin mereka juga menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan sepenuhnya Pasar, dan upaya mempertahankan negara bangsa entah bagaimana ditujukan untuk mencegah korporasi transnasional dari upaya pendiktean politik.

Globalisasi, oleh karenanya, menyoroti kecacatan filsafat sekuler dan kontradiksi-kontradiksi dalam mempertahankan struktur-struktur politik yang tidak berasal dari cita-cita integrasi global. Hal ini terbukti bukan hanya dalam inkonsistensi logika mengenai upaya mempertahankan negara bangsa, tetapi juga dalam penciptaan atau reformasi organisasi-organisasi global yang hanya akan melanggengkan kekuatan Barat yang jelas sekali dalam G8. Selama inkonsistensi logika tersebut masih ada, keadilan tidak akan dapat benar-benar dicapai, dan oleh sebab itu pula-lah kita melihat fase embrio dari sebuah pergerakan keadilan global yang berusaha untuk meruntuhkan struktur-struktur kekuatan tersebut. Tentu saja penciptaan partai politik baru dengan nama 'Respect'³ dan tumbuhnya pengaruh politik lingkungan hidup atas lansekap intelektual bermakna bahwa kita sedang melihat dimensi lain dari perjuangan antara faksi-faksi yang sedang berkuasa di dalam masyarakat dan rakyat. Perjuangan ini mencerminkan perjuangan antara rakyat, gereja, dan monarki – juga perjuangan antara para pekerja dan kaum kapitalis. Bedanya, perjuangan di abad ke-21 akan berjalan dalam skala global. Terdapat dimensi-dimensi yang berbeda dalam perjuangan ini. Ada perjuangan di antara Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia. Tinjauan dari Martin Jacques atas buku Amy Chua yang berjudul 'World on Fire' merefleksikan aspek-aspek ini, "Pada akhirnya ia menyadari posisi AS pasca-Perang Dingin dan berpendapat bahwa posisi global AS serupa dengan Pasar yang didominasi oleh etnik minoritas." Dimensi lainnya telah saya diskusikan di atas, yakni antara

³ di Inggris, wakilnya di parlemen Inggris adalah George Galloway, yang murtad dari Partai Buruh pasca invasi AS dan UK ke Irak.

pergerakan keadilan global dan kaum kapitalis. Meski demikian, ada dimensi lain yang belum benar-benar dijelajahi, yakni ideologi Islam.

Islam dan Perdebatan Mengenai Globalisasi

Dunia Islam selama lebih dari 50 tahun telah terlibat dalam perdebatan mendalam mengenai apakah kapitalisme, sosialisme, atau Islam, yang merupakan landasan kemajuan yang benar dan tepat. Perdebatan ini telah meningkat di level internasional semenjak kejadian 9/11, dan migrasi besar-besaran umat Islam ke Dunia Barat membuka lebih lanjut peluang-peluang baru bagi perdebatan global dan tantangan-tantangan global yang semua dari kita sedang menghadapinya. Terlebih lagi, perdebatan mengenai kapitalisme adalah sebuah debat internasional dan pertanyaan yang kini sedang diajukan ke depan umat manusia adalah filsafat manakah yang benar-benar filsafat politik global? Filsafat manakah yang benar-benar mampu mewujudkan cita-cita globalisasi? Dan filsafat manakah yang dapat menyediakan sebuah sistem kehidupan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan dan melakukannya dalam skala global? Aspek penting di dalam pertanyaan tersebut adalah isu identitas, dan globalisasi memberi makna bahwa pertanyaan identitas harus dijawab dalam konteks yang sebenarnya. Artinya, globalisasi memaksa kita untuk meneruskan pertanyaan identitas hingga tersedia jawaban yang logis, jika tidak disparitas dan kontradiksi intelektual akan menjadi semakin nyata dan akut. Solusi kaum kapitalis masih menggaungkan disparitas dan kontradiksi intelektual, sebab esensi dari negara bangsa masih dipertahankan. Adapaun pandangan kaum Kiri atas identitas, meski secara logis lebih konsisten, ia dilemahkan oleh sistem kehidupan yang ia bangun, terutama semenjak kematian ideologi sosialis.

Islam di sisi lain dapat dikatakan bukan hanya merupakan filsafat politik global yang pernah ada, tetapi juga satu-satunya filsafat praktis yang dapat benar-benar menangkap kekuatan-kekuatan globalisasi dan oleh karenanya ia mampu menciptakan sebuah 'Peradaban Baru' di dalam dunia posmodern.

Islam melewati batas-batas etnisitas karena ia mendefinisikan identitas di atas landasan pandangan dunia yang komprehensif. Pandangan ini berdasar pada sebuah pemahaman bahwa semua makhluk hidup diciptakan oleh satu Pencipta – Allah– dan mereka tunduk pada hukum alamNya. Islam tidak hanya memandang kita dan mendefinisikan kita dalam kapasitas kita sebagai umat manusia,⁴ tetapi hingga pada tingkatan pelarangan atas dijadikannya etnisitas sebagai asas identitas. Nabi Allah saw. berkata terkait nasionalisme, “Tinggalkanlah ia, ia adalah bangkai.” Seperangkat cara pandangan kemanusiaan ini berarti bahwa Islam merupakan sebuah kekuatan globalisasi alamiah, sebab ia menyatukan seluruh umat manusia di atas asas yang rasional, ketimbang di atas pemikiran-pemikiran yang menciptakan konflik dan ketidakharmonisan. Sekat-sekat yang tidak alami yang telah diciptakan di antara manusia sebagai konsekuensi dari pemikiran yang salah seperti nasionalisme adalah alasan utama mengapa kita melihat begitu banyak pertumpahan darah selama berabad-abad.

Orang lain bisa saja berpendapat bahwa isu keyakinan di dalam Islam mengurangi tingkat keglobalan dari pandangan ini. Maksudnya, perbedaan identitas sebenarnya eksis di dalam ranah iman dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa Islam menyediakan sebuah identitas global yang komprehensif: Islam membedakan rakyat berdasarkan pada apakah ia Muslim atau non-Muslim. Ketika kita memeriksa poin ini, kita menemukan bahwa hal tersebut sebenarnya tidak berdampak pada isu identitas secara signifikan, karena ketika Islam diterapkan melalui Negara Islam (Khilafah), negara tidak membedakan rakyatnya berdasarkan asas ini. Akan tetapi, Islam memandang rakyat berdasarkan kapasitas mereka sebagai umat manusia dan warga negara Negara Islam. Maka, tidak ada perbedaan yang dibuat di antara umat Islam dan non-Muslim, keduanya dipandang dalam kapasitas mereka sebagai umat manusia dan diperlakukan berdasarkan hukum Islam. Kita kemudian menemukan bahwa Islam mengurus semua manusia tanpa perbedaan dan menyediakan sebuah sistem kehidupan

⁴ Sebagaimana pandangan Darwinisme sosial bahwa manusia adalah satu spesies evoluf.

yang acuh tak acuh terhadap iman, ras, atau garis keturunan seseorang. Allah berfirman di dalam Al Qur'an:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (Surah Al-Hujurat [49]: 13)

“Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya? Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya ...” (Surah Abasa [80]: 17-19)

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Islam menyediakan kita sebuah pandangan global yang konsisten secara logika dan sebuah sistem kehidupan yang benar-benar konsisten dengan falsafah ini. Sistem politik Islam yang dikenal sebagai Khilafah adalah manifestasi praktis dari pandangan global ini, dan sepanjang sejarah ia telah mencetak manusia dari ras-ras yang berbeda ke dalam satu masyarakat yang homogen. Maksudnya bahwa sebuah filsafat politik global juga harus memiliki sebuah metode implementasi yang konsisten sepenuhnya dengan pemikiran dan hukum-hukumnya. Sistem Khilafah dapat mencapai derajat ini karena ia adalah sebuah negara yang ditentukan hanya oleh ideologi Islami. Poin ini menjadi semakin jelas jikalau kita menengok negara-negara yang eksis hari ini yang tidak dapat menyediakan jawaban yang memuaskan mengenai identitas seseorang yang akur dengan akal dan memberikan kedamaian di hatinya. Sedangkan konsep yang memecah belah seperti nasionalisme tetap menjadi bagian dari filsafat politik Barat sekalipun ia diubah bentuknya. Kita menemukan para pemikir Barat berusaha untuk melakukan interpretasi ulang identitas nasional sebagai konsekuensi dari tumbuhnya imigrasi ke dalam Dunia Barat, di mana konsepsi-konsepsi identitas tradisional tidak lagi dapat berjalan.

Tentu saja multikulturalisme sebagaimana yang didefinisikan oleh barat telah diakui oleh sebagian pemikir Barat sebagai sesuatu yang pada akhirnya memecah belah. Permasalahan penyatuan komunitas-komunitas yang berbeda di dalam Negara Khilafah tidak pernah menjadi sebuah isu karena Islam memecahkan

permasalahan identitas tanpa ambiguitas pun disparitas. Adapun keragaman dipandang sebagai kekuatan dan bukan kelemahan. Umat Islam dan non-Muslim telah hidup bersama selama berabad-abad dan setiap orang berkontribusi pada masa-masa keemasan Islam. Tentu saja ketika kita menengok sejarah Islam, kita menemukan bahwa Islam merangkul rakyat dari Afrika, Eurasia dan Asia Tengah, Balkan, Cina, India, Asia Tenggara, dan Eropa. Islam telah menyingkirkan sekat-sekat yang salah di antara umat manusia secara intelektual dan politik, hingga tiba masa-masa pemahaman Islam di dalam akal umat Islam dilemahkan, dan nasionalisme mencengkeram umat Islam selama masa invasi politik dan budaya di Dunia Islam oleh para kolonialis Barat. Hal tersebut bukannya menunjukkan kelemahan Islam, tetapi justru menunjukkan betapa sangat menghancurkan sesungguhnya filsafat sekuler dan nasionalisme itu. Jadi, ia adalah argumentasi yang memenangkan Islam, bukan melawan Islam.

Perdebatan globalisasi sedang dalam proses didefinisikan oleh kaum Muslim yang mampu menyediakan sebuah visi dan konsepsi alternatif atas globalisasi. Tentu saja perdebatan mengenai sekulerisme dan kapitalisme telah menjadi terglobalkan karena umat Islam menempati seluruh penjuru bumi, dan sebagaimana mereka menjadi lebih terpolitisasi, suara mereka akan semakin semakin tumbuh secara serempak. Hal ini dapat kita lihat dalam kontroversi pelarangan hijab di Perancis, di mana umat Islam bersama-sama menantang sekulerisme. Perdebatan ini telah bercabang di tingkat internasional karena ketika debat intelektual dapat dimenangkan di Dunia Barat, ia menjadi kontribusi yang teramat besar pada upaya kemenangan debat sekulerisme di tingkat internasional. Terutama ketika Barat berusaha untuk mempropagandakan nilai-nilai dan budaya mereka ke seluruh dunia. Kita sungguh-sungguh sedang berada di suatu ngarai yang besar, yang monumental, dan bersejarah. Adalah sebuah kebutuhan yang mendesak bagi kita untuk terlibat dalam perdebatan mengenai identitas ini, dan perdebatan mengenai asas kemajuan yang benar dan tepat.

Globalisasi menyediakan pada kita peluang untuk benar-benar terlibat dalam perdebatan global yang melibatkan semua umat manusia. Walaupun esai hanya menyentuh persoalan adanya peluang penting yang terbuka pada kita, esai ini seharusnya juga mengingatkan diri kita bahwa saat ini kita sedang berada di suatu titik di dalam sejarah umat manusia, di mana kita dapat benar-benar menempa sebuah dunia yang lebih baik.

Referensi

- Blair, Tony. Speech. Iraq and the threat of international terrorism. Downing Street Number 10th, 3 Mei 2004.
- Bobbit, Philip. *The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History*. Penguin Books, 2003.
- Chua, Amy. *World on Fire*. Heinemann, 2004.
- Cooper, Robert. *The Postmodern State and the World Order*. Foreign Policy Centre, June 2000.
- de Villepin, Dominique. Dimpleby Lecture 2003.
- Ferguson, Niall. *Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power*. Basic Books, April 13, 2004.
- Fukuyama, Francis. *The Great Disruption*. Profile Books, 2000.
- Giddens, Anthony. *Runaway World*. Profile Books, 2002.
- Horsman, Matthew & Andrew Marshall. *After the Nation-State: Citizens, Tribalism and the New World Disorder*. Harper Collins, 1994.
- Hutton, Will. *The World We're In*. Little, Brown, 2002.
- Jacques, Martin. *The Power of the Ethnic Minority*. Guardian Newspaper, 21st February 2004.
- Leonard, Mark & Phoebe Griffith, ed. *Reclaiming Britishness*. Foreign Policy Centre, September 2002.
- Monbiot, George. *The Age of Consent: A Manifesto for a New World Order*. Flamingo, 2003.
- Pinker, Steven. *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature*. Penguin, 2002.
- Stiglitz, Joseph. *Globalization and its Discontents*. Penguin Books, 2002.
- Toffler, Alvin. Turner Pub. March 1, 1995.